

RINGKASAN

**RATIH PURWASIH
NIM 210510261**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
ANAK ANGKAT TANPA PENETAPAN
PENGADILAN (Studi Penelitian Di Jorong
Katimahar, Kecamatan Panti, Kabupaten
Pasaman)
(Prof. Dr. Yulia, S.H., M.H. dan Dr. Marlia
Sastro, S.H., M.Hum.)**

Terdapat praktik pengangkatan anak di Jorong Katimahar (Desa Katimahar), Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, tanpa penetapan pengadilan. Padahal, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya boleh dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak di Jorong Katimahar hanya dilakukan melalui surat pernyataan bermaterai, yang menyebabkan status hukum anak angkat menjadi tidak jelas dan mengabaikan prinsip perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan praktik masyarakat yang perlu diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Jorong Katimahar serta mengkaji akibat hukumnya, khususnya terkait keabsahan status anak, hak perdata, dan jaminan perlindungan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian berada di Jorong Katimahar, Kabupaten Pasaman, dengan sumber data wawancara dengan orang tua angkat, aparat desa, hakim, panitera, serta pakar hukum keluarga. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak angkat tanpa penetapan pengadilan di Jorong Katimahar tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga anak angkat tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sah atas identitas, hak perdata, dan akses terhadap layanan publik. Perlindungan hukum belum berjalan efektif karena pengangkatan masih dilakukan secara informal melalui surat pernyataan bermaterai atau kesepakatan lisan tanpa melalui proses hukum yang sah, sehingga tidak memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak. Akibatnya, anak tidak dapat dicantumkan dalam Kartu Keluarga orang tua angkat, tidak memiliki akta kelahiran yang sesuai, dan kesulitan mengakses layanan pendidikan, kesehatan, serta bantuan sosial. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum, kuatnya kebiasaan adat, dan kurangnya edukasi menjadi faktor utama yang menyebabkan praktik ini terus berlangsung dan merugikan hak-hak dasar anak.

Saran kepada Pengadilan Agama diharapkan meningkatkan edukasi dan penyuluhan hukum secara rutin di wilayah pedesaan seperti Jorong Katimahar agar masyarakat memahami bahwa pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan demi perlindungan hukum yang sah. Selain itu, masyarakat yang berniat mengangkat anak disarankan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan sesuai prosedur hukum yang berlaku agar status hukum anak diakui secara resmi oleh negara dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Anak Angkat, Penetapan Pengadilan.*

SUMMARY

RATIH PURWASIH
NIM 210510261

**LEGAL PROTECTION FOR ADOPTED
CHILDREN WITHOUT COURT DECISION**
*(Research Study in Katimahar Hamlet, Panti
District, Pasaman Regency)*
*(Prof. Dr. Yulia, S.H., M.H. and Dr. Marlia
Sastro, S.H., M.Hum.)*

There is a practice of child adoption in Jorong Katimahar, West Sumatra without a court order. In fact, Article 12 of Government Regulation Number 54 of 2007 concerning Child Adoption states that child adoption may only be carried out based on a court order. Child adoption in Jorong Katimahar is only carried out through a stamped statement letter, which causes the legal status of adopted children to be unclear and ignores the principle of legal protection for children. This shows a gap between legal regulations and community practices that needs to be further studied.

This research aims to identify the legal protection provided to adopted children without a court decision in Jorong Katimahar and to examine the legal consequences, particularly concerning the validity of the child's status, civil rights, and protection guarantees in accordance with the applicable laws and regulations.

The research method used is empirical juridical. The study was conducted in Jorong Katimahar, Pasaman Regency, using data obtained from interviews with adoptive parents, village officials, judges, court clerks, and family law experts. The collected data were analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that legal protection for adopted children without a court order in Jorong Katimahar is not legally binding, so adopted children do not receive legal protection regarding their identity, civil rights, and access to public services. Legal protection has not been effective because adoptions are still carried out informally through stamped statements or verbal agreements without going through a legal process, thus not providing legal protection for children. As a result, children cannot be included in the adoptive parents' Family Cards, do not have appropriate birth certificates, and have difficulty accessing education, health, and social assistance services. Public ignorance of the law, strong customary customs, and a lack of education are the main factors that cause this practice to continue and harm children's basic rights.

The Religious Court is expected to increase education and legal counseling routinely in rural areas such as Jorong Katimahar so that the community understands that adoption must go through a court ruling for legitimate legal protection. In addition, people who intend to adopt a child are advised to submit a request for a ruling to the court according to applicable legal procedures so that the child's legal status is officially recognized by the state and does not cause legal problems in the future.

Keywords: Legal Protection, Adopted Child, Court Decree.